

Daftar Pusaka

A. Buku-Buku

- Agoes A. dan T. Jacob, 1992, *Antropologi Kesehatan Indonesia “Pengobatan Tradisional”*, Jilid Pertama, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Badan POM, 2015, *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman*, GNPOPA, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuady M, 2018, *Metode Riset Hukum “Pendekatan Teori dan Konsep”*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Depok.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan*, Cetakan Ke-1, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Jakarta.
- Miru A. dan S. Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11, Rajawali Pers, Depok.
- Murtie A, 2013, *Kupas Tuntas Pengobatan Tradisional : Pemahaman, Manfaat, Teknik, dan Praktik*, Cetakan Ke-1, Trans Idea Publishing, Yogyakarta.
- Musyri’ah Hanum, 2011, *Pengobatan Tradisional dengan Jamu ala Kraton sebagai warisan turun menurun*, Cetakan ke-1, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 *Kesehatan*, 13 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Perindungan Konsumen*, 20 April 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *Cipta Kerja*, 2 November 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012, *Registrasi Obat Tradisional*, 23 Februari 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, *Pengawas Obat dan Makanan*, 9 Agustus 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 *Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*, 24 Juli 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021, *Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik*.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019, *Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*, 23 Oktober 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1249, Jakarta.

C. Sumber lainnya

Devrayno, 2021, 'Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Perdagangan Obat-Obatan Tradisional', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume VI, Nomor 1, hlm. 19-34.

Nopiani dan C. Sasmito, 2019, 'Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Financial', *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Volume VII, Nomor 1, hlm. 2.

Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan), 2022, *Penjelasan Publik Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika yang mengandung Bahan Kimia Obat serta Bahan Dilarang/Berbahaya tahun 2022* 6 November 2022, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/663/Penjelasan-Publik-Temuan-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-serta-Bahan-Dilarang-Berbahaya-Tahun-2022.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir 2012-2014*, <https://www.bps.go.id/indicator/30/224/1/persentase-penduduk-yang-mengobati-sendiri-selama-sebulan-terakhir.html>.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, *Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 21 Oktober 2022, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>.